

How to the regional financial management in Bengkalis Regency?

Sonia Efriani, Nur Azlina, Mudrika Alamsyah

Universitas Riau

E-mail: Soniaefriani06@gmail.com; nur.azlina@lecturer.unri.ac.id; mudrika.hasan@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Regional financial management is all rights and obligations in the context of running a regional government that can be valued in money, including all forms of wealth related to the rights and obligations of the region and of course within the boundaries of regional authority. This study aims to examine the effect of financial accountability, supervision, budget transparency and financial report presentation on local government financial management. Population and sample in this study amounted to 32 SKPD and 96 respondents. The sampling method used in this research is positive sampling, namely the sampling technique with certain considerations. The data used in this study are primary data. The data collection technique used survey techniques, namely by distributing questionnaires. The analysis used in this study is multiple regression analysis, f test and t test.

Kata kunci: Financial Accountability, Supervision, Budget Transparency, Presentation of Financial Statements.

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art11](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art11)

PENDAHULUAN

Sistem akuntansi sektor publik di Indonesia mulai berkembang pada era reformasi sekarang ini. Perkembangan sistem akuntansi sektor publik di Indonesia didorong oleh tekanan yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan kinerja organisasi publik dalam mewujudkan sistem tata kelola keuangan yang baik. Dalam hal ini menuntut pelaksanaan pengelolaan keuangan publik melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan pemerintahan. Pengelolaan keuangan membawa hasil sebagai notasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Kewajiban lembaga publik untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Lembaga publik mendapatkan tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun

berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka dalam melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan keuangan secara baik, perlindungan *asset* fisik dan *financial*, dan mencegah terjadinya pemborosan *asset* dan salah urus. Berdasarkan pandangan tersebut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dengan misi penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.

Selain itu dalam melaksanakan kinerja, anggaran harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for money* yang berorientasi pada kepentingan publik, dan pengelolaan keuangan harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas yang tinggi, serta penerimaan dan pengeluaran daerah harus sering dimonitor yaitu dengan membandingkan antara pencapaian dengan penganggaran *value for money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2006 dalam Mardiasmo, 2009).

Dalam kaitannya untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, beberapa alat untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari tulisan yang diambil dari media cetak (internet), ternyata di dalam pengelolaan keuangan pemerintah khususnya pemerintahan Kabupaten Bengkalis masih ditemukan permasalahan dalam anggaran yang digunakan oleh masing-masing kepala daerah dan SKPD terkait. Seperti halnya di Kabupaten Bengkalis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Bupati Bengkalis Amril Mukminin dalam perkara kasus suap proyek multi years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Amril yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka diduga kuat turut menerima sejumlah gratifikasi. Amril diduga telah menerima uang sebanyak Rp 2,5 milyar untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning pada Februari 2016. Amril juga menerima uang senilai Rp 3,1 milyar setelah terjadi kesepakatan dalam rentan waktu Juni dan Juli 2017. Total uang yang diterima Amril setidaknya Rp 5,6 milyar sebelum ataupun saat menjadi Bupati Bengkalis (Lesmana & Hidayat, 2020).

Berdasarkan uraian di atas sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi sektor publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkalis masih belum seluruhnya memenuhi keinginan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang mungkin mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk proses pengelolaan keuangan daerah ini telah banyak dilakukan penelitian, antara lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012), akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011), Siregar memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat peneliti tertarik meneliti kembali variabel akuntabilitas keuangan yang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas keuangan, pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis atau belum. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Siregar (2011) pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah, sementara penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Suparno (2012) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga terciptakan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006). Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan yang baik.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sande (2013) penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus mengandung informasi yang relevan, lengkap, dan terbuka kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan pemerintahan yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang termasuk karakteristik kualitatif laporan keuangan itu antara lain: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 dimana penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih/SAL, dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Bengkalis, 2) untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Bengkalis, 3) Untuk menganalisis pengaruh transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Bengkalis, 4) Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Bengkalis.

KAJIAN LITERATUR

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan

daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang kekuasaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas).

Pengawasan

Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Pengawasan merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.

Transparansi Anggaran

Transparansi dapat dikatakan dengan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Definisi transparansi menurut Tanjung (2014) sebagai berikut: "Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan".

Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2006) bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan dari penyajian laporan keuangan itu sendiri menurut Sande (2013) adalah sebagai berikut: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan, 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan, 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati

oleh para pegawai dan otoritas publik. Akuntabilitas keuangan juga berpengaruh erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran/target kebijakan atau program. Dari uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas keuangan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan yang telah ditentukan. Pengawasan keuangan daerah perlu untuk mengetahui apakah rencana yang telah disusun sudah berjalan efektif, efisien, dan ekonomis atau belum.

Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengawasan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut serta mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Dari uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Transparansi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan akuntansi yang diterima secara umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis di provinsi Riau. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria populasi yang menjadi sampel yaitu kepala bagian keuangan dan dua staf bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, karena yang mengerti tentang penyusunan maupun laporan keuangan suatu SKPD adalah kepala bagian keuangan dan staf kepala bagian keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 96. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan diperoleh dengan menggunakan instrumen kuesioner.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah: Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Akuntabilitas Keuangan: Kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik.
3. Pengawasan Keuangan Daerah: Proses monitoring atau membandingkan antara yang telah direncanakan dengan yang telah dicapai.
4. Transparansi: Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya.
5. Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian informasi keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tanpa Pendapat (TP), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinialitas, dan Uji Heterokedastisitas.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah: Koefisien Determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*).

Analisis Regresi Berganda: Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien Regresi

X_1 = Akuntabilitas Keuangan

X_2 = Pengawasan

X_3 = Transparansi Anggaran

X_4 = Penyajian Laporan Keuangan

e = *Error*

Hipotesis bisa diterima jika hasil regresi menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05 ($p < 0,05$). Hipotesis ditolak jika hasil regresi menunjukkan hasil signifikansi di atas 0,05 ($p > 0,05$).

Uji Hipotesis (t-test)

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikan t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} atau dengan melihat p_{value} masing-masing variabel dengan tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), apabila t_{hitung} atau $P_{value} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P_{value} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

DAFTAR REFERENSI

- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lesmana, A. S., & Hidayat, W. (2020, February 6). *Usai Diperiksa, KPK Jebloskan Bupati Bengkalis Amril ke Penjara*. <https://www.suara.com/news/2020/02/06/230732/usai-diperiksa-kpk-jebloskan-bupati-bengkalis-amril-ke-penjara>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 25 Mei 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310. Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 28 Mei 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 710. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Akuntansi Pemerintah*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Pramono, A. H. 2002. *Pengawasan legislative terhadap eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah*. [Unpublished thesis]. Universitas Brawijaya.
- Sande, Peggy. (2013). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Siregar, Liper. (2011). *Pengaruh akuntabilitas publik, dan transparansi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel moderator pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*. [Tesis, Universitas Negeri Medan]. Research Direct <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29358>
- Suparno. (2012). *Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan*. [Unpublished thesis]. Universitas Negeri Medan.